

EVALUASI PENYELENGGARAAN KB DAN TKK DI KABUPATEN MANGGARAI BERDASARKAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DITJEN PAUD

¹Fransiskus De Gomes, ²Stephanus Turibius Rahmat, ³Beata Palmin

^{1,2,3} Program Studi PG PAUD STKIP Santu Paulus, Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 10, Ruteng-Flores 86508
Email: fransdegomes80@gmail.com

Abstract: Evaluating the Providence the Play Groups and Kindergarten in Manggarai Regency Based on the Norm, Standard, Procedures, and Criteria of the Directorate General of Early Childhood Education.

This study aims to evaluate providence of early childhood education especially the play groups and kindergarten in Manggarai Regency of East Nusa Tenggara. This evaluation based on the norm, standard, procedures, and criteria of the Directorate General of Early Childhood Education. It was urgent because providence of early childhood education disturbs residents in Manggarai. The study used comprehensive evaluation methods with the approach quantitative-descriptive. Design evaluation use is goal attainment model developed by Tyler (1950). Steps of the evaluation approach are define an evaluation, develop an instrument, get data, and a analyse data by compare data by available standards. A total population were 158 peoples of early childhood education institutions in Manggarai Regency. The sampling technique used dispropotionated stratified random sampling. Data types of this research are quantitative data about the availability of documents and the application of the providence principles of education for play groups dan kindergartens students. The research used closed questionnaire. Data was analyses by descriptive qualitative technique that used percentage technique. The result of research showed that score of on each of the providence components the play groups and kindergarten in Manggarai Regency were: (1) operational licenses and the establishment requirements of institutions was 46,11% or the good enough category, (2) infrastructure requirements was 25,24 % and it was categorized as inadequate, (3) score of curriculum was 26,81% or the unfavourable category, (4) quality of human capital was 16,99% and it was categorized as inadequate, (5) students administration, human resources, financial, and common management was 29,86% or the unfavourable category, (6) the financing management was 29,52% % or the unfavourable category, (7) the partnership was 7,31% and it was not good category, (8) evaluation and development management agency 4,15% and it was not good category, (9) application of early childhood education principles was 33,01% or the unfavourable category, (10) the growing detection of child was 0,12% and it was not good category, and (11) providence principles of early childhood education was 100% or very good category. The total score of the providence compenents of early childhood education was 29,01% or unfavourable category. Conclusion of the research is providence of play groups and kindergarten in Manggarai regency is clasificated as the unfavourable category based on the norm, standard, procedures, and criteria of the Directorate General of Early Childhood Education. It was caused by low quality of human capital and infrastructure resources.

Keywords: Evaluation, Providence, Play Group, Kindergarten

Abstrak: Evaluasi Penyelenggaraan KB dan TKK Di Kabupaten Manggarai Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Ditjen PAUD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan PAUD khususnya jalur Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TKK) yang ada di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Evaluasi ini mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. Penelitian ini dirasakan sangat mendesak dan penting sebab penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Manggarai sungguh memprihatinkan dan meresahkan masyarakat. Metode penelitian ini adalah metode evaluasi dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Desain evaluasi yang digunakan adalah *goal attainment model* yang dikembangkan oleh Tyler (1950). Langkah-langkah pendekatan evaluasi yang dilakukan mencakup penentuan tujuan evaluasi, mengembangkan instrumen, menjaring data, dan menganalisis data dengan cara membandingkan data dengan standar yang tersedia. Populasi penelitian berjumlah 158. Penentuan sampel menggunakan *dispropotionated stratified random sampling*. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif berkaitan dengan ketersediaan dokumen dan penerapan prinsip-prinsip pendidikan dan penyelenggaraan bagi siswa di KB dan TKK. Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data angket tertutup. Analisis data dilakukan secara kuantitatif-deskriptif dengan menggunakan teknik persentasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa skor masing-masing komponen penyelenggaraan KB dan TKK di Kabupaten Manggarai adalah: (1) izin operasional dan syarat pendirian

lembaga sebesar 46,11% atau terkategori cukup baik, (2) persyaratan prasarana dan sarana sebesar 25,24% atau terkategori kurang memadai, (3) kurikulum sebesar 26,81% atau terkategori kurang baik, (4) tenaga pendidik dan kependidikan sebesar 16,99% atau terkategori kurang memadai, (5) manajemen administrasi siswa, kepegawaian, keuangan, dan umum sebesar 29,86% atau terkategori kurang baik, (6) manajemen pembiayaan sebesar 29,52% atau terkategori kurang baik, (7) kemitraan sebesar 7,31% atau terkategori tidak baik, (8) manajemen evaluasi dan pengembangan lembaga sebesar 4,15% atau terkategori tidak baik, (9) penerapan prinsip-prinsip pendidikan bagi anak usia dini sebesar 33,01% atau terkategori kurang baik, (10) deteksi tumbuh kembang anak sebesar 0,12% atau terkategori tidak baik, dan (11) prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD sebesar 100% atau terkategori sangat baik. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh dari evaluasi penyelenggaraan KB dan TKK di Kabupaten Manggarai adalah 29,01% atau terkategori kurang baik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan KB dan TKK di Kabupaten Manggarai kurang baik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya sarana prasarana yang tersedia.

Kata Kunci: Evaluasi, Penyelenggaraan, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2004, pemerintah pusat telah mencanangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu program pokok nasional untuk meningkatkan pembangunan pendidikan. Program ini didorong oleh: pertama, hasil penelitian tentang manfaat PAUD yang membuktikan bahwa semakin anak mendapatkan banyak stimulasi dari lingkungannya maka kecerdasan anak akan semakin meningkat. Kedua, pengalaman empirik berbagai negara seperti Amerika, Jepang, Singapura, dan Cina. Negara-negara ini memiliki sumber daya manusia yang tinggi karena memiliki program pendidikan yang dicanangkan sejak dini bagi warga negaranya (Ditjen PAUD, 2013: 3). Program ini membuktikan bahwa pemerintah pusat telah berkomitmen untuk menyelenggarakan PAUD sebagai suatu lembaga pendidikan yang sejak dini berupaya menstimulasi perkembangan anak agar menjadi pribadi yang kompetitif dan bermartabat.

PAUD merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia dini. Usia dini bermakna kuantitatif sekaligus kualitatif. Secara kuantitatif, istilah usia dini berkaitan dengan periode kehidupan seseorang, yakni usia 0 sampai 6 tahun. Dalam hal ini, PAUD diartikan sebagai layanan pendidikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Istilah usia dini juga mengandung makna kualitatif, yakni usia

seseorang yang ditandai dengan sejumlah kemampuan untuk berkembang. Salah satunya adalah kemampuan kognitif. Hasil penelitian para ahli membuktikan bahwa perkembangan kognitif individu berlangsung secara pesat pada periode usia dini. Penelitian yang berfokus pada perkembangan otak manusia seperti yang dilakukan oleh Binet-Simon 1908-1911) sampai yang dilakukan Gardner (1998) membuktikan bahwa otak manusia mengalami perkembangan yang pesat pada masa usia dini, yakni mencapai 80%. Secara rinci, para ahli ini menyatakan bahwa ketika dilahirkan di dunia, seorang anak telah mencapai perkembangan otak 25%, sampai usia 4 tahun perkembangannya mencapai 50%, sampai usia 8 tahun mencapai 80%, dan selebihnya berkembang sampai usia 18 tahun (Mulyasa, 2014: 2). Sebab itu, usia dini pada anak seringkali disebut usia emas (*golden age*), yakni suatu periode yang ditandai dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat.

Berdasarkan makna kuantitatif dan kualitatif ini, maka PAUD adalah layanan pendidikan yang ditujukan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun dengan tujuan untuk mengembangkan segenap kemampuan dirinya. Kemampuan diri yang dimaksudkan berkaitan dengan aspek-aspek perkembangannya. Layanan pendidikan ini sangat penting karena semakin anak mendapatkan banyak stimulasi dari lingkungannya maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan semakin meningkat.

Sebaliknya, semakin sedikit stimulasi yang didapat anak pada usia ini, maka pertumbuhan dan perkembangannya menjadi lambat. Oleh karena itu, usia ini juga disebut dengan periode kritis. Disebut kritis karena periode ini sangat memengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Apabila pada masa ini anak kurang mendapatkan stimulasi dari lingkungannya maka diprediksi akan mengalami kesulitan pada masa-masa perkembangan selanjutnya (Pratisti, 2008: 56).

Di Indonesia, keberadaan PAUD sudah memiliki landasan yuridis yang jelas. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan perlunya penanganan pendidikan anak usia dini. Pasal 1 ayat 14 Undang-undang ini menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan utama diselenggarakan PAUD adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal untuk memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Tujuan penyertanya adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Penyelenggaraan PAUD dibagi ke dalam dua jalur pendidikan, yakni formal dan nonformal. Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal dan/atau informal; (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudhatul Atfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA), atau bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 4-6 tahun. Sedangkan pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB) untuk anak usia 2-4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) untuk anak usia

kurang dari dua tahun, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Stimulasi perkembangan anak usia dini khususnya untuk usia 2 sampai 6 tahun mengacu pada aspek-aspek perkembangannya yang mencakup aspek agama moral-agama, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni-kreativitas (Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014). Prinsip stimulasi perkembangan anak usia dini adalah belajar melalui bermain dan bermain melalui belajar. Prinsip ini menjadi karakteristik dasar pembelajaran di PAUD. Menurut Semiawan (2008: 20), bermain bagi anak merupakan suatu kegiatan yang serius tetapi mengasyikan. Melalui bermain, anak menjelajahi dunianya, dari yang belum ia kenali sampai pada yang ia ketahui dan dari yang belum dapat diperbuatnya sampai mampu melakukannya. Sebab itu, keberhasilan pembelajaran di PAUD sangat ditentukan oleh sejauhmana guru mampu mengelola aktivitas bermain anak sebagai medium untuk belajar.

Realisasi nyata program pemerintah pusat ini tampak dalam pendirian lembaga-lembaga PAUD di semua wilayah termasuk di kabupaten Manggarai. Lembaga PAUD yang ada di kabupaten Manggarai terus bertambah dari tahun ke tahun. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 158 PAUD yang telah didirikan di kabupaten Manggarai yang mencakup tiga jalur, yakni Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK). Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat kabupaten Manggarai telah menjemput program PAUD sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Jika ditelusuri dengan cermat, penambahan jumlah lembaga PAUD yang ada di kabupaten Manggarai tidak sejalan dengan peningkatan mutu penyelenggaraannya. Penyelenggaraan KB dan TKK di Indonesia mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Ditjen Pembinaan PAUD yang mencakup syarat pendirian lembaga, persyaratan sarana dan prasarana, izin operasional, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, kemitraan, prinsip-prinsip pendidikan PAUD, prinsip-prinsip penyelenggaraan KB dan TKK, evaluasi, dan

pembinaan. NSPK penyelenggaraan KB tertuang dalam Juknis KB yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Tahun 2015. NSPK penyelenggaraan TKK tertuang dalam Juknis TKK yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Tahun 2015.

Syarat pendirian KB dan TK mencakup: (1) diselenggarakan oleh pemerintah atau yayasan atau badan yang bersifat sosial dan memiliki akte dan struktur organisasi yayasan atau badan hukum lainnya, (2) penyelenggara harus mempunyai kurikulum dan program pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD, (3) memiliki kepala TK yang kualifikasi dan kompetensinya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, (4) memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) kelompok usia (usia 2-4 tahun untuk KB dan 4-6 tahun untuk TK) dengan sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang anak didik, (5) memiliki seorang guru untuk setiap kelompok usia belajar yang sesuai dengan standar kompetensi, (6) melaksanakan program kegiatan belajar yang diatur oleh pemerintah, (7) memiliki buku yang diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari buku petunjuk/pedoman guru dan buku perpustakaan baik untuk guru maupun untuk peserta didik, (8) lokasi pendirian hendaknya memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keterjangkauan, dan dekat dengan pemukiman penduduk yang relatif banyak anak usia KB atau TK, (9) memiliki sumber dana yang tetap, (10) memiliki Rekening Bank atas nama lembaga, (11) memiliki NPWP atas nama lembaga, dan (12) memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa akte/sertifikat atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persyaratan sarana dan prasarana mencakup: (1) luas lahan sekurang-kurangnya 300 m², (2) memiliki ruang bermain/ruang

belajar dengan rasio sekurang-kurangnya 3 m² per anak, baik di dalam ataupun di luar ruangan, (3) memiliki ruang kepala sekolah, guru, layanan kesehatan/UKS, toilet dengan air bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, (4) memiliki perabot, alat peragadan alat permainan di luar dan di dalam ruangan, (5) memiliki tempat untuk memajang hasil karya anak yang ditata sejajar dengan pandangan anak, leluasa, tidak terlalu penuh dengan alat permainan (masih ada ruang kosong untuk gerak anak), (6) penataan ruangan sesuai fungsinya, berikut perabot yang bersih dan terawat, (7) memiliki 2 ruang kelas dengan ukuran masing-masing minimal 8x8 m² untuk maksimal 20 siswa, (8) memiliki 1 ruang kepala KB/TK dengan ukuran minimal 3x4 m², (9) memiliki ruang guru, (10) memiliki kamar mandi/WC guru, dan (11) memiliki kamar mandi/WC siswa.

Keabsahan penyelenggaraan KB dan atau TK dibuktikan dengan SK Pendirian. Komponen kurikulum mencakup: (1) mempunyai visi dan Misi KB/TK, (2) memiliki Program Tahunan (Prota), (3) memiliki Program Semester (Promes), (4) memiliki Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM), (5) memiliki Rencana Pembelajaran Harian (RPH), (6) memiliki format penilaian sesuai dengan aspek perkembangan siswa, dan (7) memiliki laporan perkembangan siswa.

Komponen pendidik dan tenaga kependidikan meliputi: (1) memiliki guru yang berkualifikasi akademik S1 atau D IV jurusan PG.PAUD atau Psikologi Anak yang diperoleh dari Prodi yang terakreditasi, (2) memiliki guru pendamping minimal berkualifikasi akademik Strata II lulusan PG.PAUD, (3) memiliki Pengawas KB/TK, (4) memiliki Kepala KB/TK, (5) memiliki staf tata usaha, dan (6) memiliki pesuruh/penjaga sekolah.

Komponen administrasi meliputi administrasi siswa, kepegawaian, keuangan, dan umum. Administrasi siswa mencakup: (1) memiliki Formulir Pendaftaran Siswa Baru, (2) memiliki Buku Induk Siswa, dan (3) memiliki Buku Daftar Hadir Siswa. Administrasi kepegawaian meliputi: (1) memiliki Data Kepegawaian (pendidik dan kependidikan), (2) memiliki deskripsi kerja bagi pendidik dan

kependidikan, dan (3) memiliki daftar hadir. Administrasi keuangan mencakup: (1) memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), (2) memiliki buku kas, dan (3) mempunyai laporan keuangan. Administrasi umum meliputi: (1) memiliki buku tamu, (2) memiliki buku ekspedisi, (3) memiliki laporan bulanan, dan (4) memiliki notulensi rapat.

Penyelenggaraan KB dan TKK di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan KB dan TKK yang ditetapkan oleh Ditjen Pembinaan PAUD. Prinsip-prinsip tersebut mencakup: pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Dalam melaksanakan pembelajaran di KB dan TKK guru perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap anak termasuk kebutuhan akan rasa nyaman (Mulyasa, 2014: 146). Rasa nyaman di awal kehidupan dapat membangun rasa percaya anak terhadap lingkungan sekitarnya. Kedua, sesuai dengan perkembangan anak. Setiap anak memiliki pola umum perkembangan yang sama, tetapi tingkat pencapaiannya berbeda. Oleh karena itu, pendidik perlu melakukan pendekatan baik secara individual maupun kelompok dalam mengakomodasi setiap kebutuhan anak sesuai tahapan perkembangannya. Ketiga, sesuai dengan keunikan setiap individu. Anak merupakan individu yang unik, masing-masing mempunyai gaya belajar yang berbeda. Untuk mendukung hal tersebut guru harus menggunakan cara yang beragam dalam membangun pengalaman anak, menyediakan kesempatan bagi anak untuk belajar sesuai dengan potensinya. Keempat, kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Prinsip pembelajaran di PAUD adalah belajar melalui bermain, dalam nuansa edukatif. Karena itu, anak hendaknya tidak dipaksakan untuk melakukan kegiatan belajar layaknya peserta didik di jenjang yang lebih tinggi. Kelima, pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran di TK hendaknya menempatkan anak sebagai subyek pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator, motivator dan evaluator bukan yang menentukan segala sesuatu yang akan dikerjakan anak. Keenam, anak sebagai pembelajar aktif. Anak hendaknya diberi kesempatan untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Ketujuh, anak belajar

dari yang konkrit ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. Kedelapan, menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Guru perlu memfasilitasi anak untuk mendapatkan pengalaman belajar di dalam dan di luar ruangan secara seimbang dengan menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan anak. Kesembilan, merangsang munculnya kreatifitas dan inovasi. Kreatifitas anak dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan bermain pada anak melalui beragam kegiatan main (densitas) dan cukupnya waktu yang disediakan untuk bermain (intensitas) sehingga anak dapat menemukan pengetahuan baru dan mengembangkan kreativitasnya. Kesepuluh, mengembangkan kecakapan hidup anak. Guru harus memberikan kesempatan kepada anak melakukan sendiri kegiatan-kegiatan untuk menolong dirinya (sesuai dengan kemampuan anak). Kesebelas, menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Dengan menggunakan bahan dan benda yang ada di sekitar anak, maka kepedulian anak terhadap lingkungan terasah untuk ikut serta menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitarnya. Keduabelas, anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Guru dan pengelola seharusnya menyediakan bahan-bahan main yang dapat mengenalkan budaya daerah melalui permainan tradisional daerahnya sendiri yang dikemas sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Ketigabelas, melibatkan peran serta orangtua. Keterlibatan orangtua sangat menentukan dalam keberhasilan pengembangan kegiatan pembelajaran di TK. Dengan melibatkan orangtua akan ada proses belajar yang berlanjut dari sekolah ke rumah. Keempatbelas, stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan. Program pembelajaran dan kegiatan anak yang dikembangkan guru seharusnya ditujukan untuk mencapai kematangan semua aspek perkembangan. Ini berlangsung mulai dari kedatangan anak sampai kepulangannya. Oleh karena itu, guru tidak boleh luput mengamati setiap perkembangan anak selama anak di lembaga.

Komponen prinsip-prinsip penyelenggaraan TKK meliputi: (1)

ketersediaan layanan yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan masa transisi dan menampung anak-anak usia empat sampai enam tahun agar semua kelompok usia tersebut memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini, (2) transisional artinya diarahkan untuk mendukung keberhasilan masa transisi dengan melaksanakan pendekatan pembelajaran TK dan SD kelas awal, (3) kerjasama artinya mengedepankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait, masyarakat, dan perseorangan, agar terjalin sinkronisasi dan terjaminnya dukungan pembelajaran pada masa transisi antara TK dan SD kelas awal, (4) kekeluargaan yang dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuhkan sikap saling asah, asih, dan asuh, (5) keberlanjutan artinya diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak yang terkait, dan (6) pembinaan berjenjang bertujuan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pengawas TK, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

Beberapa fakta yang membuktikan penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Manggarai belum jelas adalah banyak lembaga PAUD yang belum mempunyai SK pendirian yang jelas, tidak memiliki ruang belajar, tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan, penyelenggaraan administrasi masih amburadul, tidak memiliki perangkat pembelajaran, dan lain-lain. Kenyataan ini membuktikan bahwa sebagian lembaga PAUD belum memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD.

Kondisi penyelenggaraan PAUD seperti ini menimbulkan banyak persepsi dan sikap negatif masyarakat terhadap PAUD. Sebagian masyarakat melihat PAUD sebagai kegiatan musiman di mana hanya muncul ketika ada bantuan dana pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat menganggap PAUD

sebagai proyek sekelompok orang yang ingin mendapatkan keuntungan finansial dari bantuan pemerintah. Anggapan seperti ini semakin kuat ketika penyelenggaraan kegiatan PAUD dibuat di rumah milik perorangan dan pendidikannya adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki kompetensi pendidik anak usia dini. Persepsi seperti ini menimbulkan sikap negatif yakni masyarakat tidak mendorong anaknya untuk mengikuti PAUD atau orang tua hanya menitipkan anaknya di lembaga PAUD agar terhindar dari beban pengasuhan anak.

Kondisi seperti ini yang memotivasi peneliti untuk menganalisis penyelenggaraan PAUD khususnya untuk jalur Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang ada di kabupaten Manggarai. Pemilihan KB dan TK sebagai tempat penelitian ini didasarkan pada alasan yaitu di kabupaten Manggarai lembaga PAUD yang banyak didirikan adalah jalur KB dan TK. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesiapan penyelenggaraan KB dan TK di kabupaten Manggarai berdasarkan Standar, Norma, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan PAUD secara nasional. Hasil kajian ini dapat dipakai baik untuk Pemerintah Daerah dan Program Studi Pendidikan Guru PAUD STKIP St. Paulus Ruteng dalam meningkatkan mutu KB dan TKK di Kabupaten Manggarai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian penyelenggaraan KB dan TKK di Kabupaten Manggarai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. Hasil analisis ini adalah data informatif tentang kesiapan KB dan TKK di Kabupaten Manggarai dalam menyelenggarakan PAUD. Data ini dapat dipakai Pemerintah Daerah untuk menetapkan skala prioritas peningkatan mutu penyelenggaraan KB dan TKK di Kabupaten Manggarai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah evaluasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Dasar pemilihan jenis penelitian ini adalah tujuan yang hendak dicapai, yakni

mengevaluasi penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan menurut Ditjen PAUD. Desain yang digunakan adalah *goal attainment model* yang dikembangkan oleh Tyler (1950). Adapun langkah-langkah pendekatan evaluasi yang dilakukan mencakup penentuan tujuan evaluasi, mengembangkan instrumen, menjangkau data, dan menganalisis data dengan cara membandingkan data dengan standar yang tersedia.

Populasi penelitian ini adalah semua KB dan TKK yang ada di kabupaten Manggarai yang berjumlah 158. Penelitian ini dilakukan kepada sebagian populasi (sampel). Penentuan sampel menggunakan *disproportionated stratified random sampling*. Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah angket yang bersifat tertutup yang terdiri atas dua pilihan jawaban yakni 'ada/ya' dan 'tidak/tidak ada'. Data yang dikumpulkan meliputi: (1) dokumen yang meliputi: syarat pendirian lembaga, izin operasional, kurikulum, administrasi siswa, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan pembiayaan, administrasi umum, kemitraan, dan evaluasi dan pengembangan lembaga; (2) sumber daya mencakup: tenaga pendidik dan kependidikan, dan ketersediaan sarana dan prasarana; dan (3) penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD meliputi: penerapan prinsip-prinsip pendidikan bagi AUD (khusus untuk TK), deteksi tumbuh kembang anak (khusus untuk KB), dan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah analisis masing-masing komponen yang mencakup: dokumen, sumber daya, dan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD. Tahap kedua, analisis secara keseluruhan komponen dari semua KB dan TK. Kedua tahap analisis ini menggunakan teknik persentasi. Proses kuantifikasi data adalah diberi nilai 1 (satu) apabila ya/ada dan diberi nilai 0 (nol) jika tidak/tidak ada. Skor yang diperoleh dari hasil analisis per komponen dan analisis secara keseluruhan dikonversikan ke dalam 5 (lima) kategori berdasarkan ketentuan berikut:

Tabel 1
Konversi skor yang diperoleh ke dalam lima kategori

No.	Skor	Kategori
1.	> 80%	Sangat Memadai/Sangat Baik
2.	$60% < x \leq 80%$	Memadai/Baik
3.	$40% < x \leq 60%$	Cukup Memadai/Cukup Memadai
4.	$20% < x \leq 40%$	Kurang Memadai/Kurang Baik
5.	$\leq 20%$	Tidak Memadai/Tidak Baik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: (1) dokumen yang meliputi: syarat pendirian lembaga, izin operasional, kurikulum, administrasi siswa, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan pembiayaan, administrasi umum, kemitraan, dan evaluasi dan pengembangan lembaga; (2) sumber daya mencakup: tenaga pendidik dan kependidikan, dan ketersediaan sarana dan prasarana; dan (3) penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD meliputi: penerapan prinsip-prinsip pendidikan bagi AUD (khusus untuk TKK), deteksi tumbuh kembang anak (khusus untuk KB), dan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD.

Data-data penelitian ini diperoleh dari 74 Kepala KB/TK yang usia lembaganya kurang dari 5 tahun, 31 kepala KB/TK yang usia lembaganya berkisar 5 – 10 tahun, dan 9 kepala KB/TK yang usia lembaganya berusia lebih dari 10 tahun. Total respondenya adalah 158 orang atau 72,15% dari populasi. Dilihat dari kategori letak/alamat sekolah, terdapat 32 orang yang mengabdikan di KB/TK Kecamatan Langke Rembong, sementara sisanya (82 orang) mengabdikan di KB/TK yang letaknya di desa. Secara institusional, semua responden ini berasal dari 114 lembaga KB/TK yang ada di Kabupaten Manggarai.

Data yang diperoleh dari 114 responden dikelompokkan ke dalam sebelas komponen. Hasil analisis data kesebelas komponen tersebut disajikan pada bagian berikut ini.

Izin Operasional dan Syarat Pendirian Lembaga

Ada tiga belas komponen utama yang harus dipenuhi dalam mendirikan lembaga KB/TK. Data hasil survei membuktikan bahwa terdapat 113 atau 99,12% lembaga KB/TK sudah mempunyai izin operasional dalam bentuk Surat Keputusan Pemerintah Daerah, 42 atau 36,84% KB/TK mempunyai yayasan atau badan yang bersifat sosial sebagai penyelenggara, namun hanya ada 26 atau 22,81% KB/TK yang yayasan atau badan penyelenggaranya memiliki akte dan struktur organisasi. Penyelenggaraan KB/TK masih sangat bervariasi. Hal ini disukung oleh data yang menunjukkan bahwa hanya 49 atau 42,98% yayasan atau badan penyelenggara yang mempunyai kurikulum dan program pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD.

Jabatan kepala KB/TK di Kabupaten Manggarai didominasi oleh orang yang kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa hanya ada 1 atau 99,65% kepala KB/TK yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007.

Dalam penyelenggaraannya, terdapat 43 atau 37,72% KB/TK yang memiliki sekurang-kurangnya satu kelompok usia (usia 2-4 tahun untuk KB dan 4-6 tahun untuk TK) dengan sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang anak didik. Dari 37,72% KB/TK ini, hanya 9 atau 0,79% yang mempunyai seorang guru untuk setiap kelompok usia belajar yang sesuai dengan standar kompetensi. Selanjutnya, hanya ada 29 atau 25,44% KB/TK yang

melaksanakan program kegiatan belajar sesuai aturan pemerintah.

Data ketersediaan buku yang diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari buku petunjuk/pedoman guru dan buku perpustakaan baik untuk guru maupun untuk peserta didik menunjukkan bahwa 11 atau 0,96% KB/TK yang memenuhi syarat ini. Selanjutnya, 61 atau 53,51% KB/TK mempunyai lokasi sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, mudah terjangkau atau dekat dengan pemukiman penduduk yang relatif banyak anak usia KB/TK.

Jumlah KB/TK yang mempunyai sumber dana yang tetap adalah 92 atau 80,70%, yang memiliki rekening bank atas nama lembaga sebanyak 113 atau 99,12%, yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga sebanyak 113 atau 99,12%, dan 56 atau 49,12% KB/TK memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa akte/sertifikat atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, legalitas penyelenggaraan KB/TK di Kabupaten Manggarai terkategori cukup baik dengan persentasi 46,11%. Aspek yang mendapatkan skor tertinggi adalah izin pendirian atau operasional dalam bentuk SK Pemerintah Daerah (99,12%), memiliki rekening bank atas nama lembaga (99,12%), dan mempunyai NPWP atas nama lembaga (99,12%). Aspek yang mendapat skor terendah adalah kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah (0,35%).

Persyaratan Prasarana dan Sarana

Jumlah lembaga KB/TK yang mempunyai luas lahan sekurang-kurangnya 300 m² adalah sebanyak 43 atau 37,72%, namun hanya ada 18 atau 15,79% KB/TK yang memiliki ruang bermain/ruang belajar dengan rasio sekurang-kurangnya 3 m² per anak, baik di dalam ataupun di luar ruangan. Selanjutnya, ada 25 atau 21,93% KB/TK yang

mempunyai ruang kepala sekolah dan ruang guru. Hanya ada 3 atau 0,26% KB/TK yang mempunyai layanan kesehatan/UKS. Semua sekolah mempunyai toilet dengan air bersih baik untuk guru maupun siswa tetapi hanya 4 atau 0,35% KB/TK yang memberikan data mempunyai dapur sekolah. KB/TK yang memiliki perabot, alat peragadan, alat permainan di luar dan di dalam ruangan adalah sebanyak 12 atau 10,53%, yang memiliki tempat untuk memajang hasil karya anak sebanyak 28 atau 24,56% KB/TK, 31 atau 27,19% KB/TK yang menata setiap ruangan sesuai fungsinya, dan hanya 16 atau 14,04% KB/TK yang mempunyai ruang kelas dengan ukuran masing-masing minimal 8x8 m² untuk maksimal 20 siswa.

Secara keseluruhan, tingkat ketersediaan prasarana dan sarana terkategori kurang baik (25,24%). Aspek yang mendapat skor tertinggi adalah ketersediaan toilet dengan air bersih baik untuk guru maupun siswa (110%) sedangkan aspek yang mendapat skor terendah adalah ketersediaan layanan kesehatan/UKS (0,26%).

Kurikulum

Hasil analisis data tentang kurikulum menunjukkan bahwa terdapat 74 atau 64,91% KB/TK yang mempunyai visi dan misi, 14 atau 12,28% KB/TK yang mempunyai Program Tahunan, Program Semester, Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM), dan Rencana Pembelajaran Harian (RPH). Dari 12,28% KB/TK ini, hanya terdapat 8 atau 0,70% KB/TK yang memiliki format penilaian sesuai dengan aspek perkembangan siswa, namun ada 82 atau 72,93% KB/TK yang memiliki laporan perkembangan siswa.

Secara keseluruhan, tingkat ketersediaan kurikulum pembelajaran pada KB/TK di Kabupaten Manggarai masih terkategori kurang baik (26,81%). Aspek kurikulum yang mendapat skor tertinggi adalah laporan perkembangan siswa (72,93%), sedangkan aspek yang mendapat skor terendah adalah ketersediaan format penilaian sesuai dengan aspek perkembangan siswa (0,70%).

Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Hasil analisis data tentang tenaga pendidik dan kependidikan menunjukkan bahwa terdapat 5 atau 0,49% KB/TK yang mempunyai guru berkualifikasi akademik S1 atau D IV jurusan Pendidikan Guru PAUD atau Psikologi Anak yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi dan mempunyai guru pendamping lulusan program studi Pendidikan Guru PAUD. Selanjutnya, semua KB/TK tidak mempunyai pengawas internal lembaga kecuali pengawas yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai. Semua KB/TK mempunyai kepala sekolah, namun hanya ada 3 atau 0,26% KB/TK yang mempunyai staf tata usaha dan terdapat 8 atau 0,70% KB/TK mempunyai pesuruh/sopir/penjaga sekolah.

Secara keseluruhan, tingkat ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan KB/TK yang ada di Kabupaten Manggarai terkategori tidak memadai (16,99%). Aspek yang mendapat skor tertinggi adalah ketersediaan kepala sekolah (100%), sedangkan aspek yang terendah adalah ketersediaan pengawas internal lembaga (0%).

Manajemen Administrasi Siswa, Kepegawaian, Keuangan, dan Umum

Hasil Analisis data administrasi siswa menunjukkan bahwa terdapat 18 atau 15,79% KB/TK yang memiliki formulir pendaftaran siswa baru namun semua KB/TK memiliki Buku Induk Siswa. Selanjutnya, hanya terdapat 41 atau 35,96% KB/TK yang mempunyai daftar hadir siswa setiap hari.

Hasil analisis data administrasi kepegawaian menunjukkan bahwa hanya ada 24 atau 21,05% KB/TK yang memiliki data kepegawaian, mempunyai daftar hadir harian bagi pendidik dan kependidikan, namun hanya ada 4 atau 0,35% KB/TK yang memiliki deskripsi kerja bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

Hasil analisis data administrasi keuangan menunjukkan bahwa hanya 26 atau 22,81% KB/TK yang mempunyai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), ada 84 atau 73,68% mempunyai buku kas dan memiliki laporan keuangan.

Hasil analisis data administrasi umum menunjukkan bahwa ada 14 atau 12,28% KB/TK yang mempunyai buku tamu, 6 atau 0,53% KB/TK mempunyai buku ekspedisi, 12 atau 10,53% KB/TK memiliki laporan bulanan, dan hanya 5 atau 0,44% KB/TK yang mempunyai notulensi rapat.

Secara keseluruhan, tingkat manajemen administrasi KB/TK di Kabupaten Manggarai terkategori kurang baik (29,86%). Aspek administrasi yang mendapat skor tertinggi adalah ketersediaan Buku Induk Siswa (100%) sedangkan aspek terendah adalah deskripsi kerja bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

Manajemen Pembiayaan

Hasil analisis data manajemen pembiayaan menunjukkan bahwa hanya 3 atau 0,26% KB/TK yang mempunyai pedoman penetapan biaya pendidikan, ada 2 atau 0,17% KB/TK yang mempunyai biaya investasi yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Selanjutnya, ada 96 atau 84,21% KB/TK yang memiliki biaya operasional yang digunakan untuk gaji guru dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional lainnya. Ada 105 atau 92,11% KB/TK yang memiliki biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh siswa untuk biaya operasional sekolah.

Secara keseluruhan manajemen pembiayaan KB/TK di Kabupaten Manggarai terkategori kurang baik (29,52%). Aspek manajemen pembiayaan yang mendapat skor tertinggi adalah memiliki biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh siswa untuk biaya operasional sekolah (92,11%) sedangkan aspek yang mendapat skor terendah adalah biaya investasi yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap.

Manajemen Kemitraan

Data manajemen kemitraan menunjukkan bahwa ada 24 atau 21,05%

KB/TK yang mempunyai komite sekolah yang dibuktikan oleh SK, ada 8 atau 0,70% KB/TK yang bermitra dengan organisasi profesi, dan hanya 2 atau 0,17% KB/TK yang bekerja sama dengan Puskesmas/Rumah Sakit. Secara keseluruhan, manajemen kemitraan KB/TK di Kabupaten Manggarai terkategori terkategori tidak baik (7,31%). Aspek yang mendapat skor tertinggi adalah mempunyai komite sekolah yang dibuktikan dengan SK (21,05%) sedangkan aspek yang mendapat skor terendah adalah kerja sama dengan Puskesmas/Rumah Sakit (0,17%).

Manajemen Evaluasi dan Pengembangan Lembaga

Hasil analisis data manajemen evaluasi dan pengembangan lembaga menunjukkan bahwa hanya ada 1 atau 0,09% KB/TK yang memiliki Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan memiliki sistem monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah. Selanjutnya, ada 14 atau 12,28% KB/TK yang mempunyai program pembinaan sekolah berupa akreditasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah setempat.

Secara keseluruhan, manajemen evaluasi dan pengembangan lembaga KB/TK di Kabupaten Manggarai terkategori tidak baik (4,15%). Aspek manajemen evaluasi dan pengembangan lembaga yang mendapat skor tertinggi adalah program pembinaan sekolah berupa akreditasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah setempat (12,28%) sedangkan yang mendapat skor terendah adalah ketersediaan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan memiliki sistem monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah.

Penerapan Prinsip-prinsip PAUD

Hasil analisis data tentang penerapan prinsip-prinsip pendidikan bagi anak usia dini menunjukkan bahwa semua responden (100%) menyambut kedatangan anak dengan penuh kehangatan, memberi anak pujian untuk memotivasinya dalam mencoba menyelesaikan pekerjaannya sendiri, dan memperlakukan semua anak secara adil tanpa membeda-

bedakannya. Namun, hanya 12 atau 10,53% KB/TK yang memberi stimulasi kepada anak berdasarkan tingkatan usianya (RPPH dibuat berdasarkan STTPA), menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media pembelajara yang bervariasi, dan melakukan variasi dalam pembelajaran melalui permainan, gerak dan lagu yang menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, ada 14 atau 12,28% KB/TK yang memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri seperti belajar bermain mencampur warna, menggambar, dan lain-lain), terdapat 9 atau 0,79% KB/TK yang memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dengan media dan sumber belajar yang disediakan dalam pembelajaran dan membantu anak agar aktif bermain dengan berbagai media pembelajaran yang ada. Ada 38 atau 33,33% responden yang menyatakan bahwa guru selalu menjawab pertanyaan anak secara wajar dan menyenangkan, 62 atau 54,39% responden memberikan data bahwa penataan lingkungan bermain dan penggunaan alat permainan edukatif dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Kemudian, terdapat 36 atau 31,58% responden menyatakan bahwa anak diberi waktu yang cukup untuk mengembangkan kreatifitasnya dan belajar tentang budayanya sendiri. Tak ada satupun KB/TK yang menyelenggarakan kegiatan tema dengan melibatkan orangtua dan yang menyatakan ada kesinambungan materi yang diberikan guru di sekolah dan orangtua di rumah.

Secara keseluruhan, kemampuan para guru KB/TK dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan bagi anak usia dini terkategori kurang baik (33,01%). Aspek penerapan prinsip-prinsip pendidikan bagi anak usia dini yang mendapat skor tertinggi adalah kemampuan menyambut kedatangan anak dengan penuh kehangatan, memberi anak pujian untuk memotivasinya dalam mencoba menyelesaikan pekerjaannya sendiri, dan memperlakukan semua anak secara adil tanpa membeda-bedakannya (100%). Sementara aspek yang mendapat skor terendah adalah penyelenggaraan kegiatan tema dengan melibatkan orangtua dan yang menyatakan ada

kesinambungan materi yang diberikan guru di sekolah dan orangtua di rumah (0%).

Deteksi Tumbuh Kembang Anak

Hasil analisis data tentang deteksi tumbuh kembang anak menunjukkan bahwa hanya ada 6 atau 0,53% KB/TK yang menimbang berat badan anak untuk melihat pertumbuhan berat badannya dan mengukur tinggi/panjang badan anak untuk melihat pertumbuhan tinggi badan namun tidak setiap bulan. Hanya ada 1 atau 0,09% KB/TK yang mengukur besar lingkaran kepala anak setiap untuk melihat pertumbuhan lingkaran kepala, dan memeriksa bagian kepala (rambut, mata, telinga, hidung, mulut, gigi), kulit, kuku, tangan dan kaki untuk melihat kebersihan dan kesehatan namun dilaksanakan pada waktu tertentu saja. Setiap KB/TK tidak mempunyai catatan yang sistematis, berkala, dan berkesinambungan tentang kemampuan bersosialisasi, perkembangan emosional, perkembangan kemampuan berbahasa, perkembangan motorik kasar dan halus, dan perkembangan kognitif setiap siswa. Catatan tentang aspek-aspek perkembangan ini lebih banyak dibuat secara aksidental.

Secara keseluruhan, kemampuan guru KB/TK untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak terkategori tidak baik (0,12%). Semua aspek deteksi tumbuh kembang anak mendapatkan skor yang rendah dengan rentangan 0% - 0,53%.

Penerapan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan PAUD

Data tentang penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD menunjukkan bahwa semua KB/TK menyatakan bahwa layanan yang diberikannya bertujuan untuk: (1) menampung anak-anak usia KB/TK yang belum terjangkau oleh satuan layanan PAUD dan (2) mendukung keberhasilan stimulasi pada pendidikan anak usia dini untuk menyiapkan anak masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Setiap responden juga menyatakan bahwa layanan yang diberikannya dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuhkan sikap saling asah, asih, dan asuh serta diselenggarakan secara berkelanjutan

dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak yang terkait. Secara keseluruhan, kemampuan guru KB/TK untuk menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD terkategori sangat baik (100%).

Berdasarkan uraian ini, data dan kategori penyelenggaraan KB/TK di Kabupaten Manggarai untuk setiap komponen manajemen adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Sajian hasil analisis data untuk setiap komponen penyelenggaraan KB/TK di Kabupaten Manggarai

No.	Komponen Penyelenggaraan KB/TK	Skor (%)	Kategori
1.	Izin operasional dan syarat pendirian lembaga	46,11	Cukup baik/cukup memadai
2.	Persyaratan prasarana dan sarana	25,24	Kurang baik/kurang memadai
3.	Kurikulum	26,81	Kurang baik/kurang memadai
4.	Tenaga pendidik dan kependidikan	16,99	Tidak baik/tidak memadai
5.	Manajemen administrasi siswa, kepegawaian, keuangan, dan umum	29,86	Kurang baik/kurang memadai
6.	Manajemen pembiayaan	29,52	Kurang baik/kurang memadai
7.	Kemitraan	7,31	Tidak baik/tidak memadai
8.	Manajemen evaluasi dan pengembangan lembaga	4,15	Tidak baik/tidak memadai
9.	Penerapan prinsip-prinsip pendidikan bagi anak usia dini	33,01	Kurang baik/kurang memadai
10.	Deteksi tumbuh kembang anak	0,12	Tidak baik/tidak memadai
11.	Prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD	100	Sangat baik/sangat memadai
Total		$\frac{319,12}{11} = 29,01$	Kurang baik/kurang memadai

Tabel 2 ini memberikan informasi bahwa penyelenggaraan KB/TK di Kabupaten Manggarai terkategori kurang baik/kurang memadai berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan menurut Ditjen PAUD tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor yang diperoleh dari evaluasi penyelenggaraan KB/TK di Kabupaten Manggarai adalah 29,01%. Dari sebelas komponen penyelenggaraan KB/TK menurut Ditjen PAUD, komponen yang mendapat skor tertinggi dalam penyelenggaraan KB/TK di Kabupaten Manggarai adalah penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD (100%), sedangkan komponen yang mendapat skor terendah adalah deteksi tumbuh kembang anak (0,12%).

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan KB dan TK di Kabupaten Manggarai kurang sesuai berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2014. Kelemahan mendasar yang menyebabkan penyelenggaraan KB dan TK di Kabupaten Manggarai terkategori kurang baik adalah sumber daya manusia yang kurang memadai. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah pengelola, kepala sekolah, guru PAUD, guru pendamping, staf tata usaha, pengawas internal sekolah, dan tenaga pendukung (sopir, pesuruh, satuan pengamanan sekolah).

Pengelolaan KB dan TK yang belum maksimal tampak jelas dalam beberapa indikasi, yakni: pertama, mayoritas (99,12%) lembaga KB dan TK di Kabupaten Manggarai sudah mempunyai izin operasional dalam bentuk Surat Keputusan Pemerintah Daerah namun hal itu tidaklah cukup. SK izin operasional haruslah didukung oleh sejumlah syarat pendirian lainnya yang harus dipenuhi, antara lain mempunyai organisasi yang jelas, sumber dana yang tetap dan jelas, serta prasarana dan sarana yang memadai. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya 36,84% KB dan TK yang mempunyai yayasan atau badan yang bersifat sosial sebagai penyelenggara, dan dari 36,84% ini hanya 22,81% KB dan TK yang yayasan atau badan penyelenggaranya memiliki akte dan struktur organisasi. Kedua, dalam penyelenggaraannya, hanya 37,72% KB dan TK yang memiliki sekurang-kurangnya satu kelompok usia (usia 2-4 tahun untuk KB dan 4-6 tahun untuk TK) dengan sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang anak didik. Dari 37,72% KB dan TK ini, hanya 0,79% yang mempunyai seorang guru untuk setiap kelompok usia belajar yang sesuai dengan standar kompetensi. Ketiga, hanya 25,44% KB dan TK yang melaksanakan program kegiatan belajar sesuai aturan pemerintah. Kenyataan ini membuktikan bahwa kemampuan pengelola KB dan TK di Kabupaten Manggarai masih sangat terbatas. Keempat, hanya 49,12% KB dan TK yang memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa akte/sertifikat atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Lahan dan gedung yang tersedia juga tidak sesuai dengan syarat minimal. Kelima, ketersediaan buku yang diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar masih sangat terbatas. Keenam, manajemen evaluasi dan pengembangan lembaga terkategori tidak baik, yang dibuktikan dengan ketakterediaan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan sistem monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah.

Peran yang banyak dimainkan oleh pengelola hanya sebatas mengurus izin operasional, menyiapkan rekening bank dan NPWP atas nama lembaga. Sementara tugas yang berkaitan dengan penyusunan pedoman penetapan biaya, perencanaan pengembangan

dan investasi untuk kemajuan lembaga hampir terabaikan. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya pengelola KB dan TK di Kabupaten Manggarai belum maksimal. Pengelola masih mengharapkan sepenuhnya bantuan dana pemerintah untuk pengembangan lembaganya. Hal ini tentu saja bisa berdampak pada keberlangsungan penyelenggaraan KB dan TK itu sendiri. Layanan pendidikan diberikan jika ada bantuan dana pemerintah. Fakta inilah yang menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga PAUD umumnya di mana PAUD dianggap sebagai proyek sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Minimnya kesiapan penyelenggaraan KB dan TK di Kabupaten Manggarai juga tampak dalam jabatan kepala sekolah, guru, guru pendamping, staf tata usaha, dan staf pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 0,09% kepala KB dan TK yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007. Guru yang berkualifikasi akademik S1 atau D IV jurusan PG.PAUD atau Psikologi Anak dan guru pendamping lulusan program studi Pendidikan Guru PAUD hanya 0,49%., hanya ada 3 atau 0,26% KB/TK yang mempunyai staf tata usaha dan terdapat 8 atau 0,70% KB dan TK mempunyai pesuruh/sopir/penjaga sekolah.

Minimnya kualitas kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia menyebabkan sulitnya merumuskan visi dan misi yang jelas dan terukur dan rendahnya kualitas perangkat pembelajaran yang tersedia. Menurut Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014, ada dua dimensi dasar kurikulum, yakni: (1) rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, dan (2) cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 PAUD yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2014/2015 memenuhi kedua dimensi tersebut. Dalam konteks PAUD, operasionalisasi kurikulum tampak nyata pada visi dan misi yang jelas dan terukur, Program Tahunan, Program Semester, Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM), Rencana Pembelajaran Harian (RPH), metode penilaian yang sesuai dengan aspek perkembangan siswa, dan laporan perkembangan siswa.

Perumusan visi dan misi KB dan TK tidak melibatkan semua *stakeholders* dan penyusunan perangkat pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan cara *copy paste* dari sekolah lain tanpa mempertimbangkan *input* (siswa) dan konteks sekolah. Padahal, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD menyatakan bahwa kompetensi guru PAUD dan guru pendamping mencakup kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara tepat sesuai dengan perkembangan anak. Perencanaan yang dimaksudkan mencakup perumusan visi dan misi sekolah untuk selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Program Tahunan, Program Semester, RPM, RPH, dan perencanaan evaluasi yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan anak

Dampak lain dari minimnya kualitas kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia adalah tidak tersedianya program kemitraan, manajemen administrasi yang kurang baik, tidak tersedianya layanan deteksi dini tumbuh kembang anak, dan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD yang kurang baik. Kemitraan lembaga PAUD dengan pihak-pihak lain merupakan suatu upaya membangun kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak usia dini. Pihak-pihak lain yang dilibatkandalam kemitraan mencakup komite sekolah yang terdiri atas orangtua, pemerhati pendidikan, dan alumni TK. Menurut Juknis Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (2013: 49), kemitraan yang baik dengan komite bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama tentang model pendidikan anak usia TK yang dapat mendukung program sekolah. Selain, komite sekolah, mitra PAUD lainnya adalah organisasi profesi. Kemitraan dengan organisasi profesi seperti Ikatan Guru PAUD diperlukan sebagai wadah komunikasi sesama guru PAUD untuk meningkatkan kompetensi. Lembaga PAUD juga perlu membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan PAUD. Salah satu komponen masyarakat yang harus bermitra dengan lembaga PAUD adalah pihak medis (Puskesmas atau Rumah Sakit).

Kemitraan lembaga PAUD dengan Puskesmas atau Rumah Sakit dapat membantu guru untuk mendeteksi secara dini tumbuh kembangan anak khususnya berkaitan dengan pertumbuhan dan kesehatan fisik anak.

Data kemitraan KB dan TK di Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa ada 24 atau 21,05% KB/TK yang mempunyai komite sekolah yang dibuktikan oleh SK, ada 8 atau 0,70% KB/TK yang bermitra dengan organisasi profesi, dan hanya 2 atau 0,17% KB/TK yang bekerja sama dengan Puskesmas/Rumah Sakit. Realitas ini menunjukkan bahwa lembaga KB dan TK di Kabupaten Manggarai masih bekerja sendiri dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman kepala sekolah, dan guru KB dan TK akan kemitraan serta rendahnya dukungan pengelola sekolah dalam membangun kemitraan.

Minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga menyebabkan terabaikannya layanan deteksi dini tumbuh kembang anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan guru KB dan TK di Kabupaten Manggarai untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak terkategori tidak baik (0,12%). Deteksi dini adalah kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Pertumbuhan diartikan dengan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, misalnya berat tubuh, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, pertumbuhan gigi dan pertumbuhan tulang. Sementara perkembangan adalah bertambahnya fungsi psikis dan fisik anak meliputi sensorik (mendengar, melihat, meraba, merasa, dan menghidu), motorik (gerakan motorik kasar dan halus), kognitif (pengetahuan, kecerdasan), komunikasi (berbicara dan bahasa), serta sikap religius, sosial-emosional dan kreativitas (Permendikbud No. 146 tentang Kurikulum 2013 PAUD). Minimnya pemberian layanan deteksi dini tumbuh kembang anak membuat KB dan TK di Kabupaten Manggarai tidak mempunyai data yang akurat dan komprehensif tentang potensi

dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan siswanya. Dengan demikian, siswa yang mempunyai potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dibantu secara dini baik oleh guru PAUD itu sendiri sesuai dengan kompetensinya maupun pihak lain yang relevan melalui mekanisme alih tangan.

Minimnya ketersediaan staf tata usaha berdampak pada manajemen administrasi siswa, kepegawaian, keuangan, dan umum. Administrasi siswa mencakup formulir pendaftaran siswa baru, Buku Induk Siswa, dan daftar hadir siswa setiap hari. Administrasi kepegawaian meliputi data kepegawaian, daftar hadir harian bagi pendidik dan kependidikan, dan deskripsi kerja bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Administrasi keuangan meliputi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), buku kas, dan laporan keuangan. Administrasi umum mencakup buku tamu, buku ekspedisi, laporan bulanan, dan notulensi rapat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa manajemen administrasi KB dan TK di Kabupaten Manggarai terkategori kurang baik (29,86%).

Dampak lain dari rendahnya kualitas kompetensi dan kuantitas guru PAUD adalah minimnya kemampuan menerapkan prinsip-prinsip layanan pendidikan bagi anak usia dini. Menurut Juknis Penyelenggaraan KB dan TK (2013), ada empat belas prinsip layanan pendidikan bagi anak usia dini, yakni: (1) menyambut kedatangan anak dengan penuh kehangatan, (2) memberi anak pujian untuk memotivasinya dalam mencoba menyelesaikan pekerjaannya sendiri, (3) memperlakukan semua anak secara adil tanpa membedakan, (4) memberi stimulasi kepada anak berdasarkan tingkatan usianya (RPPH dibuat berdasarkan STTPA), (5) menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media pembelajara yang bervariasi, (6) melakukan variasi dalam pembelajaran melalui permainan, gerak dan lagu yang menyenangkan bagi anak, (7) memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri seperti belajar bermain mencampur warna, menggambar, dan lain-lain), (8) memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dengan media dan sumber belajar yang disediakan dalam pembelajaran dan membantu

anak agar aktif bermain dengan berbagai media pembelajaran yang ada, (9) guru selalu menjawab pertanyaan anak secara wajar dan menyenangkan, (10) penataan lingkungan bermain dan penggunaan alat permainan edukatif dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan bagi anak, (11) anak diberi waktu yang cukup untuk mengembangkan kreatifitasnya, (12) anak belajar tentang budayanya sendiri, (13) menyelenggarakan kegiatan tema dengan melibatkan orangtua, dan (14) ada kesinambungan materi yang diberikan guru di sekolah dan orangtua di rumah. Hasil penelitian membuktikan bahwa kemampuan para guru KB dan TK di Kabupaten Manggarai dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan bagi anak usia dini terkategori kurang baik (33,01%).

Satu-satunya komponen penyelenggaraan KB dan TK di Kabupaten Manggarai yang mendapat kategori sangat baik adalah penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD yang mencakup: (1) menampung anak-anak usia KB/TK yang belum terjangkau oleh satuan layanan PAUD, (2) mendukung keberhasilan stimulasi pada pendidikan anak usia dini untuk menyiapkan anak masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, (3) layanan yang diberikannya dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuhkan sikap saling asah, asih, dan asuh serta diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak yang terkait. Meskipun mendapat kategori sangat baik, aspek-aspek penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD ini sebenarnya hanya merupakan semangat dasar yang memotivasi penyelenggaraan KB dan TK. Hal ini berarti implementasi yang sesungguhnya dari penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD tampak dalam kemampuan guru memberikan stimulasi yang sesuai dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA). Apabila guru tidak mampu memberikan stimulasi yang sesuai STPPA maka penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD dinilai gagal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan KB dan TK di Kabupaten Manggarai kurang sesuai berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2014. Kelemahan mendasar yang menyebabkan penyelenggaraan KB dan TK di Kabupaten Manggarai terkategori kurang baik adalah sumber daya pengelola, kepala sekolah, guru PAUD, guru pendamping, staf tata usaha, pengawas internal sekolah, dan tenaga pendukung yang kurang memadai.

Pengelola KB dan TK di Kabupaten Manggarai kurang mampu menata organisasi lembaga secara baik dan menyediakan fasilitas yang memadai. Pengelola sebagai penyelenggara belum mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pengelolaan KB dan TK. Peran yang banyak dimainkan oleh pengelola hanya sebatas mengurus izin operasional, menyiapkan rekening bank dan NPWP atas nama lembaga. Sementara tugas-tugas lain seperti penyusunan pedoman penetapan biaya, perencanaan pengembangan dan investasi untuk kemajuan lembaga, penyediaan prasarana dan sarana hampir terabaikan. Pengelola masih mengharapkan sepenuhnya bantuan dana pemerintah untuk pengembangan lembaganya.

Selain pengelola, kualitas kompetensi dan kuantitas kepala sekolah, guru, guru pendamping, dan staf tata usaha KB dan TK di Kabupaten Manggarai tergolong rendah. Hal ini berdampak pada kualitas proses penyelenggaraan PAUD, yang mencakup kurikulum, manajemen administrasi, program kemitraan, layanan deteksi dini tumbuh kembang anak, dan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang ditawarkan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KB dan TK di Kabupaten Manggarai. Pertama, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai diharapkan untuk: (1) Memonitor dan mengevaluasi

penyelenggaraan PAUD secara berkala agar dapat dipetakan kekurangan atau kelemahannya; (2) Memfasilitasi peningkatan sumber daya pengelola melalui pelatihan manajemen PAUD agar dapat mengelola lembaga PAUDnya dengan baik; (3) Memberikan pelatihan melalui workshop dan tutorial bagi kepala sekolah, guru PAUD, dan guru pendamping agar kompetensinya dalam menyelenggarakan PAUD dapat ditingkatkan; (4) Melakukan studi kelayakan yang cermat sebelum merekomendasikan pendirian suatu lembaga PAUD ke Bupati Manggarai. Kedua, Kepala Desa setempat diharapkan agar membangun kerja sama dengan lembaga PAUD di desanya terutama dalam menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PAUD. Ketiga, Program Studi Pendidikan Guru PAUD STKIP Santu Paulus Ruteng diharapkan untuk memberikan pelatihan agar pengelola, kepala sekolah, guru PAUD, dan guru pendamping dapat mengembangkan kompetensinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Direktorat Pembinaan Paud. 2013. *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Kemendikbud.
- Direktorat Pembinaan Paud. 2015. *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain*. Jakarta: Kemendikbud.
- Ditjen PAUD. 2013. *Kerangka Pembangunan Paud Indonesia Periode 2011- 2025*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Fadlillah, Muhammad. 2012. *Desain Pembelajaran PAUD Tinjauan Teoretik & Praktik*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Mulyasa, H.E. 2014. *Manajemen PAUD*. Cet. ke-3. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pratisti, Wiwien D. 2008. *Psikologi Anak Usia Dini*. Bogor: PT Indeks.

Semiawan, Conny R. 2008. *Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan Sekolah Dasar*. Cet. ke-3. Jakarta: PT Indeks.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wiyani, N. Ardy. 2015. *Manajemen Paud Bermutu: Konsep dan Praktik MMT di KB, TK/RA*. Yogyakarta: Gava Media.